



Mahein Nian Lian Nú. 37, 09 Juli 2012

## Uang Ikut Berdansa Dalam Pesta Demokrasi

### Pendahuluan

Istilah "*Money Politics*" menjadi diskusi publik di Timor-Leste ketika menjelang pemilihan Presiden Republik periode 2012-2017 pada putaran pertama dan kedua. *Money politics* merupakan istilah yang berarti penggunaan uang untuk membeli dukungan politik melalui transaksi jual beli suara.<sup>1</sup> Dalam sejarah Timor-Leste, praktek *money politics* sudah kenal pada tahun 1975, beberapa partai politik mendapat dukungan uang maupun materi dari luar negeri. Dukungan ini sangat berpengaruh situasi politik Timor-Leste waktu itu dan meletusnya perang saudara hingga invasi militer Indonesia 7 Desember 1975. Ketika Timor-Leste menjadi bagian dari Ke-27 Propinsi Republik Indonesia, aktor politik dan militer dengan uang memperkuat dukungan politik, membeli informasi, membayar kaki-tangannya menangkap aktivis pro-kemerdekaan dan dengan uang untuk menbunuh, hingga Referendum 30 Agustus 1999.<sup>2</sup>

Laporan Fundasaun Mahein nomor 32 (*Mahein Nia Lian Nú. 32 Pratika Money Politika iha Eleisaun Prezidensial 2012*), mengungkapkan fakta praktek *money politics* dalam pemilihan Presiden Republik periode 2012-2017 dari beberapa calon presiden (CAPRES). Laporan itu menjadi fenomena kontroversial ketika menentuh beberapa CAPRES. Komisi Nasional Pemilihan Umum atau CNE (*Comissão Nacional de Eleições*) juga melalui media menanggapi beberapa praktek yang dilakukan oleh CAPRES dari partai politik dan CAPRES independen yang memfasilitasi transportasi kepada anggota partai politik, pelajar dan masyarakat, bahwa itu adalah praktek *money politics*.<sup>3</sup> Namun laporan itu dan tanggapan CNE hanya tinggal dengan diskusi publik, tidak menindak lanjuti dimata hukum oleh aparat penegak hukum. Lebih ironis lagi, CAC (*Comissão Anti Corupção*) mengatakan tidak ada indikasi praktek *money politics* dalam pemilihan presiden kemarin.<sup>4</sup> Seharusnya CAC dan institusi penegak hukum harus menindak lanjuti proses investigasi terhadap para CAPRES dan kader-kadernya.

Tanggapan dari beberapa kader partai politik bahwa memfasilitasi transportasi kepada anggota partai politik, pelajar dan masyarakat bukan praktek *money politics*. Justru membantu masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum sebab lambangnya pemerintah dalam menanganani kasus itu. Di sisi lain Undang-Undang Pemilihan Presiden Republik tidak

---

<sup>1</sup> Elektoral Politik dengan Money Politics <http://fisip.uns.ac.id/blog/bhela/2011/09/10/elektoral-politik/>

<sup>2</sup> Mahein Nia Lian Nú. 32, Pratika *Money Politika iha Eleisaun Prezidensial 2012*.  
<http://www.fundasaunmahein.org/2012/03/28/pratika-money-politika-ih-eleisaun-prezidensial-2012/>

<sup>3</sup> Jornal Nacional Diario. Rabu 14 Maret 2012

<sup>4</sup> <http://suara-timor-lorosae.com/jornal/berita-12138--eleisaun-prezidensial-kak-laiha-dadus-pratika-money-politik-.html>

memungkinkan masyarakat memberi suaranya dimana saja dia berada tetapi di desa yang dimana ia mendaftarkan diri sebagai pemilih.<sup>5</sup>

## Money Politics Kembali Terungkap

Setelah pemilihan Presiden Republik tanggal 16 April kemaring, ketika Pengadilan Tinggi atau *Tribunal Rekursu* mengumumkan hasil pemilihan secara resmi. Partai politik kembali beraktivitas baik di tingkat nasional maupun di desa, sebagai tahap persiapan merebut 65 kursi Parlemen Nasional. Pemilihan Presiden Republik putaran pertama 17 Maret 2012 dan putaran kedua 16 April 2012 yang lalu ada banyak isu permainan uang, maka pada pemilihan legislatif yang akan bergulir 7 Juli 2012 nanti pun problem klasik ini juga diduga akan banyak terjadi.

Fenomena *money politics* kembali terungkap publik, tentu saja penyimpangan berupa penyuapan tersebut tidak lepas dari penyimpangan lain yaitu menyangkut dana kampanye ilegal yang ikut berdansa dalam pesta demokrasi. Masalah politik uang tampaknya kembali akan terus mewarnai kancah perpolitikan kita, khususnya pada pelaksanaan pemilihan legislatif.

Fakta terungkap oleh beberapa media nasional, baik media surat kabar maupun televisi. Dimana publikasi media suara kabar STL (*Suara Timor Lorosa'e*) tertanggal 16 Mei 2012 bahwa partai tertentu mengadakan "Malam Dana" mendapat dukungan dana baik dari pengusaha nasional maupun internasional dengan jumlah 2 juta Dollar Amerika.<sup>6</sup> Hal ini di tangapi oleh anggota Parlemen Nasional dari Fraksi PUN (*Partidu Unidade Nasional*), Fernanda Borges. Bahwa "Malam Dana" adalah suatu praktek melanggar hukum yang diatur dalam peraturan kampanye pemilihan parlementar. Borges juga meminta kepada CNE untuk memblokir rekening partai tertentu dan meminta kepada PGR (*Procurador Geral da República*) dan CAC (*Comissão Anti Corupção*) untuk melakukan investigasi terhadap praktek tersebut. Sebab praktek ini dilarang oleh peraturan STAE yang mengatur tentang kampanye partai politik.<sup>7</sup>

Menurut hukum yang berlaku di Timor-Leste yang mengatur tentang kampanye partai politik. Dimana diatur dalam Peraturan STAE No.03/STAE/X/2011 *Regulamentu Kona-bá Kampane Eleitoral bá Eleisaun Sira Presidencial no Parlamentar*, BAB VI pasal 30. Dalam pasal ini berbunyi:

**"Bandu bá kandidatu sira, partidu politiku no koligasaun partidaria sira simu donativu osan husi: a) Empreza pública sira; b) Sociedade ho kapital eksklusivu ka boot liu estadu nian; c) Empreza konsesionariu ba serbisu públiku; d) Ema koletivu ne'ebé presta ba públiku ka dedika atividade bá benefisensia ka bá fim relijiozu; e) Asosisaun profesional sira, sindikatu sira ka patraun sira; f) Fundasaun sira; g) Governu ka ema estrajeiru balun".<sup>8</sup>**

<sup>5</sup> Lei Nú 08/2011 de 22 de Junho, Segundu Alterasaun Lei Nú 07/2006 de 28 de Desembro (Lei Eleitoral Prezidenti República).

<sup>6</sup> Jurnal Suara Timor Lorosa'e. Rabu 16 Mei 2012

<sup>7</sup> Telejornal Tetun, Radio Televizaun Timor-Leste (RTTL). Kamis, 17 Mei 2012.

<sup>8</sup> Regulamentu STAE No. 03/STAE/X/2011 Regulamentu Kona-bá Kampane Eleitoral ba Eleisaun Sira Presidencial no Parlamentar.

Artinya peraturan No. 30/STAE/2011 melarang partai politik dan koalisi partai menerima dana dari pengusaha, perkumpulan profesional dan yayasan, baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk apapun. Namun CNE menanggapi bahwa praktek ini tidak melanggar hukum.<sup>9</sup> FM mencermati bahwa CNE juga ikut manipulasi fakta. Mengapa? Karena, ketika partai tertentu mengadakan malam dana, pertama CNE menanggapi bahwa praktek itu melanggar hukum<sup>10</sup> namun ketika partai tersebut menanggapi bahwa praktek yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang dan itu legal, CNE juga ikut arus bahwa malam dana adalah legal.<sup>11</sup>

Di sisi lain, diskusi informal dalam kalangan masyarakat bahwa ada praktek tertentu di lakukan oleh beberapa partai politik melalui aktivitasnya dari pintu ke pintu rumah masyarakat. Ketika menyampaikan program partai politiknya uang dan materi juga ikut menjelaskan ketidakjelasan apa yang di sampaikan oleh kader partai politik. Hal ini terungkap ketika menjelang hari terakhir kampanye partai politik di seluruh teritori nasional.<sup>12</sup> Permainan yang sama dilakukan oleh partai tertentu dalam kampanye politiknya ketika menyampaikan program partainya, membagikan “Nasi Kotak” kepada para masyarakat yang ikut hadir dalam kampanye, uang juga ikut menyodorkan dibawah nasi kotak tersebut.<sup>13</sup>

Fakta yang sama di sampaikan oleh presiden Partai Demokrat Fernando “Lasama” de Araujo ketika menyampaikan program partainya di distrik Baucau menyatakan bahwa kemungkinan terjadi *money politics* dilakukan oleh beberapa partai besar di masa tenang (antara tanggal 5 dan 6 Juli 2012) sebelum pemilihan. Lasama juga mengatakan bahwa pada hari tenang itu juga kader-kader partai lain akan membawa US\$ 20.00 sampai US\$ 50.00 untuk membeli suara rakyat untuk memilih partainya.<sup>14</sup>

### **Dari Mana Uang itu?**

Melalui laporan ini FM memanggil publik bahwa kita sama-sama melihat kembali beberapa pemilihan umum yang kita lalui baik pemilihan Presiden Republik maupun pemilihan Legislatif akan mendatang. Dengan singkat FM menjawab pertanyaan di atas, dari mana uang itu? Aliran dana masih dalam misteri namun fakta terungkap di lapangan. Kita mencermati bahwa pengeluaran biaya konsolidasi dan kampanye pemilihan umum partai politik memobilisir masa dari berbagai desa dan daerah lainnya dengan rombongan ratusan kendaraan, biaya konsumsi, spanduk mewah, poster mewah dan atribut lainnya. Mesti adanya aliran dana dari pihak tertentu baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk membiayainya.

Dalam periode 2007-2012 pemerintah membiayai program pembangunan nasional melalui beberapa paket pembangunan yaitu Paket Referendum atau *Pakote Referendum*, Program Pembangunan Desentralisasi atau PDD-1 dan PDD-2 (*Programa Dezenvolvimentu Desentralizasaun*) dan Program Pembangunan Lokal atau PDL (*Programa Dezenvolvimentu*

<sup>9</sup> Jurnal Independente. Rabu, 29 Mei 2012

<sup>10</sup> Jurnal Independente. Jumat, 25 Mei 2012

<sup>11</sup> Jurnal Independente. Rabu, 29 Mei 2012

<sup>12</sup> Diskusi Informal dengan Salah Satu Sumber Terpercaya Tinggal di Dili. Sabtu, 16 Juni 2012

<sup>13</sup> Salah satu sumber FM terpercaya tinggal di Dili. Jumat, 22 Juni 2012

<sup>14</sup> Jurnal Suara Timor Lorosa'e. Senin, 02 Juli 2012

*Loka*) dengan biaya jutaan dollar. Hal ini perlu telesuri arah aliran dana proyek pembangunan kemana dan dioperasikan oleh siapa? Menjadi kontroversial dalam kalangan politik bahwa proyek pembangunan tersebut ada yang tidak melalui proses tenderisasi namun hanya dengan *Single Source* kepada kolega dan pengusaha yang mendukung partai politik. Lebih ironis lagi partai politik tertentu menyatakan (dalam pemilihan Presiden Republik kemarin) memobilisir anggota partai, pelajar dan masyarakat dari Dili ke distrik mendapat dukungan transportasi dari pengusaha yang berhubungan baik dengan partai.<sup>15</sup> Kemungkinan besar masih ada permainan-permainan lain seperti korupsi namun semuanya hanya retorika dalam kalangan politik.

Melihat kembali pada sejarah kita tahun 1974-1975, berdirinya beberapa partai politik yaitu UDT (*União Democrática Timorese*), FRETILIN (*Frente Revolucionário Timor-Leste Independente*), APODETI (*Associação Popular Democrática Timorese*), KOTA (*Klibur Oan Timor Asuwa'in*) dan Partai Tralabhistha. Partai APODETI mendapat dukungan dari Republik Indonesia baik dukungan politik, uang maupun materi. Kemudian disusul juga UDT menginjak jejak kaki APODETI. Dukungan ini memicu intervensi politik luar negeri, fakta terbukti dengan invasi militer 7 Desember 1975.

Ini sebagai suatu referensi harus kita belajar masa lalu kita, namun di era kemerdekaan ini situasi berbeda. Apa itu sebenarnya? Ada beberapa partai politik kerja sama internasional dengan partai politik negara tetangga kita, dengan pesawat terbang mendarat di "Hotel Berbintang" mendiskusikan kerja sama partai politik.<sup>16</sup> Ada apa dibalik itu? Dengan jawaban singkat "mestinya bantuan dana kampanye". Hal ini mesti ada dampaknya, partai politik akan menjadi boneka luar negeri, setiap gerak-gerik dan program partai politik atas bantuan remot yang dimainkan oleh pemain *Game* politik. Intervensi luar negeri akan membawa instabilitas politik dalam negeri dan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai program yang di diktakan aktor-aktor politik dari luar negeri.

### **Bagaimana Membongkar?**

Yang jadi persoalan serius adalah bagaimana melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas politik uang, khususnya menyangkut penerimaan sumbangan kampanye yang tak jelas di atas? Bagaimana jika dilakukan secara lebih sistematis, melibatkan jumlah materi yang besar, atau melibatkan tokoh-tokoh penting partai yang menduduki jabatan politisi tinggi? Inilah yang pada pemilihan Presiden Republik 17 Maret dan 16 April 2012 kemarin dilaporkan banyak terjadi tetapi sangat sulit membawa ke pengadilan. Banyaknya dana kampanye dan materi dari penyumbang tak jelas, dilaporkan oleh Organisasi Non-Pemerintah dan CNE juga menanggapi terhadap praktek yang dilakukan oleh partai politik. Namun semuanya tidak menindaklanjuti di mata hukum sebab Timor-Leste belum memiliki hukum yang mengatur tentang praktek money politics.

Bukan itu saja, ketika Timor-Leste menjelang pemilihan legislatif, beberapa media nasional mengungkap kembali hal yang sama yakni dana dari beberapa pengusaha mengalir ke partai

---

<sup>15</sup> Diskusi Informal dengan Salah Satu Pemimpin Partai Politik. Kamis, 22 Maret 2012

<sup>16</sup> Diskusi Informal dengan Salah Satu Sumber Informasi dari Luar Negeri. Senin, 12 Maret 2012.

politik tertentu. Dalam konteks inilah pengawasan dan penegakan hukum untuk menangani politik uang terkait, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan harus ditegakkan. Perlu catat bahwa problem utamanya adalah Timor-Leste belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang praktek *money politics* atau suap yang mendefinisikan tentang *money politics*. Apakah *money politics* dalam konotasi uang ataukah melibatkan materi lainnya sebagai kategori *money politics*?<sup>17</sup>

FM melihat bahwa institusi CNE memiliki kekuatan hukum untuk mengawasi praktek yang dilarang peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan STAE No. 03/STAE/X/2011 *Regulamentu Konaba Kampane Eleitoral ba Eleisaun Sira Presidencial no Parlamentar*. CNE harus meminta kepada setiap partai politik, berdasarkan peraturan perundang-undangan No.03/STAE/X/2011 pasal 32 berbunyi:

**“Publisidade konta kampane eleitoral: 1) Kandidatu sira, partidu politiku no ba koligasaun partidaria sira tenki apresenta konta kampane eleitoral ba CNE atu verifika iha loron tolunulu tuir mai ba loron eleisaun; 2) Konta tenki regista hotu movimentu husi kedas loron ba publikasaun ba loron eleisaun to’o loron rua liu hafoin loron eleisaun; 3) Konta kandidatu sira nian, partidu politiku no koligasaun partidaria refere ba kampane eleitoral tenki publika gratuita iha Jornal Republika, akompaina mos ho paraser husi CNE iha prazu loron hatnulu resin lima hahu simu husi CNE; 4) CNE verifika konta sira iha prazu loron tolunulu; 5) CNE bele mos kontratu espesialista husi liur ba asisti”.**<sup>18</sup>

Dalam pasal tersebut berbunyi setiap partai politik dan koalisi partai harus mendeklarasikan biaya kampanye kepada CNE untuk verifikasi dalam waktu tiga puluh hari dan seluruh daftar biaya harus diumumkan di hari pemilihan sampai dua hari setelah pemilihan. Biaya kampanye partai politik atau koalisi partai harus diumumkan dalam lembaran negara atau *Jornal da Repúblika*, bersamaan dengan surat rekomendasi dari CNE dalam waktu empat puluh lima hari mulai diterima dari CNE. Yang menjadi pertanyaan, apakah CNE bisa melakukan hal ini sesuai dengan mandat yang diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku? Lebih ironis lagi dana kampanye CAPRES kemarin putaran pertama dan kedua (17 Maret dan 16 April 2012) samapi saat ini beberapa Eks CAPRES belum mendeklarasikan kepada CNE.<sup>19</sup> Masalah ini terjadi karena CNE belum optimalkan mandat pengawasan terhadap para CAPRES yang ikut dalam pemilihan kemarin. Hukum harus ditegakkan, sebagai badan pengawasan elektoral memiliki kekuatan yuridis harus meminta kepada seluruh eks CAPRES sesuai undang-undang berlaku.

Di sisi lain, Hukum Pidana Timor-Leste atau *Codigo Penal* (2009) pasal 234 yang mengatur tentang transaksi jual beli suara yang diatur dalam ayat 1 berbunyi:

---

<sup>17</sup> Diskusi di Radio Lorico (FM 100.5 Mhz) antara Peneliti Fundasaun Mahein João Almeida Fernandes, Komisaris CNE Arief Abdullah Sagran dan Adjunto Diretor Provedoria Direitos Humanus e Justiça (PDHJ) Silveiro Batista. Jumat, 22 Juni 2012

<sup>18</sup> Regulamentu STAE No. 03/STAE/X/2011 Regulamentu Kona-bá Kampane Eleitoral ba Eleisaun Sira Presidencial no Parlamentar. número 1 to’o 5.

<sup>19</sup> Jornal Independente. Kamis, 28 Juni 2012

**“Ema ne’ebé ho violensia, ameasa ho violensia ka artifisiu fraudelentu halo obriga ema seluk, hasoru nia vontade, la vota ka ho sentidu determinadu ka sosa ka fa’an votu sei hetan pena prizaun tinan 3 ka multa”.**<sup>20</sup>

Artinya barang siapa dengan kekerasan, ancam dengan kekerasan memaksa orang lain terhadap kemauannya, tidak memilih atau dengan sengaja atau jual beli suara, dengan pidana 3 tahun penjara atau ganti rugi. FM mencermati bahwa hukum pidana Timor-Leste lebih tegas dalam mengatur praktek jual beli suara, tetapi pelaksanaannya kembali pada institusi penegak hukum seperti *Procurador Geral da República* (PGR) dan CAC untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Sebab PGR dan CAC sebagai institusi yang memiliki mandat dalam menyelusuri kasus kriminal dan menuntut di mata pengadilan.

## **Kesimpulan**

Merebaknya money politics membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui *money politics* kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”. Oleh karena itu, pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di sisi lain, *money politics* akan memperlemah dan menodai proses demokrasi, dan dengan kuatnya pengaruh uang adalah kecacatan demokrasi.

Untuk mengatasi setiap partai politik yang menyalahi aturan atau melakukan penyelewengan *money politics*, peranan CNE harus dikedepankan. Kinerja CNE harus lebih optimal dan meminta setiap partai politik dan koalisi partai mendeklarasikan biaya kampanye kepada CNE. CNE sebagai forum adjudikasi yang memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga diskualifikasi terhadap partai politik. CNE harus tegas, ketika partai politik menyalahi aturan besar.

## **Rekomendasi**

1. Parlemen Nasional dan pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur tentang praktek *money politics*.
2. PGR dan CAC harus melakukan investigasi lebih lanjut dan menyelusuri aliran dana ke partai politik tertentu.
3. CNE harus meminta kepada setiap partai politik dan koalisi partai mendeklarasikan biaya kampanye selama periode kampanye mulai tanggal 5 Juni sampai 4 Juli 2012 sesuai waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan diumumkan dalam lembaran Negara atau *Jornal da República*.
4. Setiap partai politik dan koalisi partai perlu kolaborasi dengan institusi penegak hukum bila ada indikasi tertentu, dalam hal investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum.

---

<sup>20</sup> Kodigu Penal Timor-Leste (2009). Artigu 234, número 1.

## Referensi

### **Dokumen:**

Lei Nú 08/2011 de 22 de Junho, Segundu Alterasaun Lei Nú 07/2006 de 28 de Desembro (Lei Eleitoral Prezidenti Repúblika).

Regulamentu STAE Nú. 03/STAE/X/2011, Regulamentu Konaba Kampane Eleitoral ba Eleisaun Sira Presidencial no Parlamentar.

### **Wawancara:**

Diskusi di Radio Lorico (FM 100.5 Mhz) antara Peneliti Fundasaun Mahein João Almeida Fernandes, Komisaris CNE Arief Abdullah Sagan dan Adjunto Diretor PDHJ Silveiro Batista. Jumat, 22 Juni 2012.

Diskusi Informal dengan Salah Satu Pemimpin Partai Politik. Kamis, 22 Maret 2012

Diskusi Informal dengan Salah Satu Sumber Informasi dari Luar Negeri. Senin, 12 Maret 2012.

Diskusi Informal dengan Salah Satu Sumber Terpercaya tinggal di Dili. Sabtu, 16 Juni 2012

Salah Satu sumber FM terpercaya tinggal di Dili. Jumat, 22 Juni 2012

### **Internet:**

Elektoral Politik dengan Money Politics

<http://fisip.uns.ac.id/blog/bhela/2011/09/10/elektoral-politik/>

Pratika Money Politika iha Eleisaun Prezidensial 2012.

<http://www.fundasaunmahein.org/2012/03/28/pratika-money-politika-ih-eleisaun-prezidensial-2012/>

Eleisaun Prezidensial KAK Laiha Dadus Pratika Money Politik

<http://suara-timor-lorosae.com/jornal/berita-12138--eleisaun-prezidensial-kak-laiha-dadus-pratika-money-politik-.html>

### **Media Surat Kabar dan TV:**

Jornal Nacional Diario. Rabu 14 Maret 2012

Jornal Independente. Kamis, 28 Juni 2012

Jornal Suara Timor Lorosa'e. Rabu 16 Mei 2012

Jornal Suara Timor Lorosa'e. Senin, 02 Juli 2012

Telejornal Tetun, Radio Televizaun Timor-Leste (RTTL). Kamis, 17 Mei 2012.

Jornal Independente. Selasa, 23 Mei 2012

Jornal Independente. Jumat, 25 Mei 2012